



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2025/Periodik - 2024)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN MAROS  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ISMAIL
2. Jabatan : PENGAWAS PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH (P2UPD)
3. NHK : 724113

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **685.750.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/72 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 8091 m2 di KAB / KOTA MAROS, Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/36 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 136.000.000
4. Tanah Seluas 9368 m2 di KAB / KOTA MAROS, WARISAN Rp. 93.680.000
5. Tanah Seluas 1076 m2 di KAB / KOTA MAROS, WARISAN Rp. 10.760.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 431 m2/96 m2 di KAB / KOTA MAROS, WARISAN Rp. 75.000.000
7. Tanah Seluas 584 m2 di KAB / KOTA MAROS, WARISAN Rp. 11.680.000
8. Tanah Seluas 4562 m2 di KAB / KOTA MAROS, Rp. 22.810.000
9. Tanah Seluas 2388 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 35.820.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **42.500.000**

1. MOTOR, HONDA NF11B2DI M/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, YAMAHA BEB A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000



3. LAINNYA, WUJIN MESIN TEPUNG Tahun 2019, HASIL SENDIRI  
Rp. 1.200.000
4. MOTOR, HONDA GENIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.  
12.000.000
5. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.  
18.000.000
6. LAINNYA, BMX BMX Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	30.050.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	170.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	177.014.380
F. HARTA LAINNYA	Rp.	10.000.000
Sub Total	Rp.	1.115.314.380
III. HUTANG	Rp.	123.656.410
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	991.657.970

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.